

**Analisis Kinerja Keuangan Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-
2018**

*Analysis Of Financial Performance And Financial Administration In Regional
Implementation Regional Autonomy In Barito Kuala District 2015-2018*

Sri Wardani*, Muhammad Saleh

Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
[*danot.wardani13@gmail.com](mailto:danot.wardani13@gmail.com)

Abstract

This study aims to assess the financial performance of the local government of Barito Kuala Regency by using the Financial Ratio Analysis of the Regional Budget and Revenue (APBD) of Barito Kuala Regency in the 2015-2018 Fiscal Year. In this study, the analysis tools used are Regional Financial Performance Analysis and Analysis of Regional Financial Capabilities. Financial Performance Analysis is measured by calculating the Independence Ratio, Activity Ratio, Effectiveness and Efficiency Ratio, and Growth Ratio. At the same time, Financial Ability Analysis is measured by calculating the Routine Ability Index and Fiscal Autonomy Degree Ratio.

Based on the results of the calculation of Regional Financial Performance, it can be concluded that the relationship pattern of regional independence is instructive, meaning that the provincial government is still very dependent on central government transfer funds. Simultaneously, the Activity Ratio level is not balanced, where local governments prioritize Indirect Expenditure compared to Direct Expenditure. However, the level of regional effectiveness and efficiency ratio shows a practical and efficient level. Based on the average growth ratio shows that growth is fluctuating from year to year. Change tends to be positive, but Direct Spending shows negative growth. While based on the results of the calculation of Regional Financial Capabilities, it can be concluded that the results of the analysis of Routine Capacity Index and Fiscal Autonomy Degree Ratio are on a scaling scale, meaning that the financial capacity of Barito Kuala district is not yet ideal, because the role of the central government is still very dominant.

Keywords: *APBD Financial Ratio Analysis, Regional Financial Performance, Regional Financial Capability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015-2018. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah. Dimana Analisis Kinerja Keuangan diukur dengan alat hitung Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Efektivitas dan Efisiensi serta Rasio Pertumbuhan. Sedangkan Analisis Kemampuan Keuangan diukur dengan menghitung Indeks Kemampuan Rutin dan Rasio Derajat Otonomi Fiskal.

Berdasarkan hasil perhitungan Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa, pola hubungan tingkat Kemandirian daerah bersifat intruktif, artinya pemerintah daerah masih sangat bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat. Sedangkan tingkat Rasio Aktivitas tidak seimbang, dimana pemerintah daerah lebih memprioritaskan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan Belanja Langsung. Namun tingkat Rasio Efektivitas dan Efisiensi daerah menunjukkan tingkat yang sangat efektif dan efisien. Berdasarkan Rata-rata Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa pertumbuhan bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan cenderung positif namun Belanja Langsung menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan Indeks Kemampuan Rutin dan Rasio Derajat Otonomi Fiskal berada pada skala kurang, artinya kondisi kemampuan keuangan kabupaten Barito Kuala belum ideal, karena peran pemerintah masih sangat dominan.

Kata kunci: *Analisis Rasio Keuangan APBD, Kinerja Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom dalam mengatur serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui otonomi pemerintah daerah mendorong dan memotivasi masyarakat daerah untuk berinovasi sehingga dapat bersaing dengan daerah lain. Undang-undang ini dimaksudkan agar daerah mampu menggali potensi daerah guna meningkatkan kinerja keuangannya sehingga mampu mewujudkan kemandirian daerah dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Dalam mengukur kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Keuangan Daerah dan yaitu dengan menghitung Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan. Hal ini berguna untuk mengevaluasi atau membandingkan dana atau tolak ukur antar periode.

Selain itu juga diperlukan Indikator Kemampuan Keuangan Daerah dengan menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dan Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintah daerah dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Barito Kuala merupakan kabupaten yang memiliki PAD rendah diantara kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala dengan nama ibu kota Marabahan merupakan satu pemerintahan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 3.284 km². Dimana sebagian wilayahnya dikelilingi oleh sungai dan rawa. Kondisi ini menyebabkan tanah daerah ini mengandung lahan gambut dan tingkat keasaman tanah mencapai 3-5 ph. Dengan keterbatasan kualitas lahan tersebut, membuat masyarakat terbatas pula dalam pemilihan bercocok tanam, tidak banyak tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah tersebut sebagaimana daerah lainnya. Beberapa tanaman andalan Barito Kuala yang dapat tumbuh dengan cukup baik adalah padi, jeruk, sawit dan karet. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi daerah juga menjadi faktor rendahnya PAD Barito Kuala. Seperti misalnya potensi wisata Barito Kuala seperti Pulau Kembang yang mana hingga saat ini tidak dijadikan pemerintah Barito Kuala sebagai sumber PAD yang berpotensi.

Berikut adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-2018:

Tabel 1
Realisasi APBD Kabupaten Barito Kuala 2015-2018

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	DAPER	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2015	1,150,009,328,727.03	68,275,029,232.03	1,081,530,035,495.00	204,264,000.00
2016	1.289.267.836.499,00	62.659.830.635,00	1.225.445.196.626,00	1.162.809.238,00
2017	1,224,047,410,607.00	92,134,311,469.00	1,077,565,140,030.00	54,347,959,108.00
2018	1,281,758,336,456.78	105,162,770,092.78	1,143,216,907,700.00	33,378,658,664.00

Sumber: Data diolah, 2019.

Terlihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barito Kuala pada tahun 2015 hingga tahun 2018 hanya menyumbang sekitar 7,3% dari Total Pendapatan Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Barito Kuala masih sangat bergantung terhadap bantuan Pemerintah Pusat. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengangkat Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-2018”.

Berdasarkan latar belakang, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ditinjau dari rasio keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam periode 2015-2018?

Sedangkan tujuan penelitian sebagai berikut: Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah ditinjau dari rasio keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala periode 2015-2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebenarnya telah dimiliki dan melekat seiring berdirinya suatu daerah. Otonomi daerah secara umum memiliki tujuan menciptakan kehidupan politik demokratis, menciptakan sistem di tengah masyarakat yang dapat menjamin pemerataan dan keadilan, serta menggali sumber potensi natural dan kultural setiap daerah. Ketiga tujuan tersebut merupakan upaya dalam menghadapi tantangan globalisasi guna terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberi kewenangan terhadap setiap daerah otonom dalam menggali sumber-sumber potensi daerahnya sendiri sehingga mampu menunjang keuangan daerah guna terwujudnya kemandirian daerah.

Keberhasilan Otonomi Daerah

Dalam menjalankan otonomi daerah terdapat beberapa ukuran untuk mengukur kemampuan suatu daerah (Kaho, 2005), yaitu kemampuan struktural organisasi dalam menjalankan segala aktivitas baik pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam organisasi. Kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas didukung dengan pendidikan formal maupun informal. Kemampuan pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan daerah otonom. Serta yang paling utama adalah kemampuan keuangan suatu daerah otonom dalam membiayai segala bentuk kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat.

Selain itu, faktor manusia, keuangan, peralatan dan manajerial juga turut andil dalam mencapai keberhasilan daerah otonom (Kaho, 2005).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi seta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku” (Mamesah:1995 dalam Halim, 2002).

Konsep *Value For Money*

value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama. *Pertama* ekonomi: yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. *Kedua*, Efisiensi: yaitu pencapaian output dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. *Ketiga*, Efektivitas: yaitu tingkat pencapaian dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Arfie Yasrie (2017) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 menunjukkan hasil pola hubungan tingkat kemandirian bersifat instruktif dan peran pemerintah pusat sangat dominan.

Subianto (2011) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2005 S/D 2009. Menunjukkan hasil Kinerja Keuangan belum optimal karena anggaran serta realisasi PAD sangat rendah. Pola hubungan kemandirian intruktif. dan peranan pemerintah pusat lebih dominan. Perlu adanya pendataan terhadap potensi pajak yang ketat.

Astriana Nabila Muhibtari (2014) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008. Menunjukkan hasil pola hubungan kemandirian intruktif. peranan pemerintah pusat lebih dominan. Tingkat

efektivitas dan efisien terbilang cukup baik. Kondisi kemampuan keuangan Kota Magelang belum optimal.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan metode analisis Rasio Kinerja Keuangan daerah dan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah didukung oleh data deskriptif kuantitatif, yaitu membuat gambaran dan perhitungan terhadap data yang diperoleh sesuai dengan penelitian, yaitu menganalisis rasio terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015-2018 dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015-2018 dari data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari periode satu ke periode berikutnya.

Definisi Operasional Variabel

Kinerja Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Rasio Kemandirian Daerah dilakukan dengan cara membandingkan besaran PAD dengan total biaya transfer pemerintah pusat berupa bantuan daerah atau pinjaman daerah.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Rasio efektivitas merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan PAD dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan Rasio efisiensi merupakan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang akan diterima.

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan upaya pemerintah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara optimal.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan alat ukur pemerintah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai antar periode.

Kemampuan Keuangan Daerah

a. Rasio Derajat Otonomi Fiskal

DOF menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri dan merupakan wujud dari umpan balik kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.

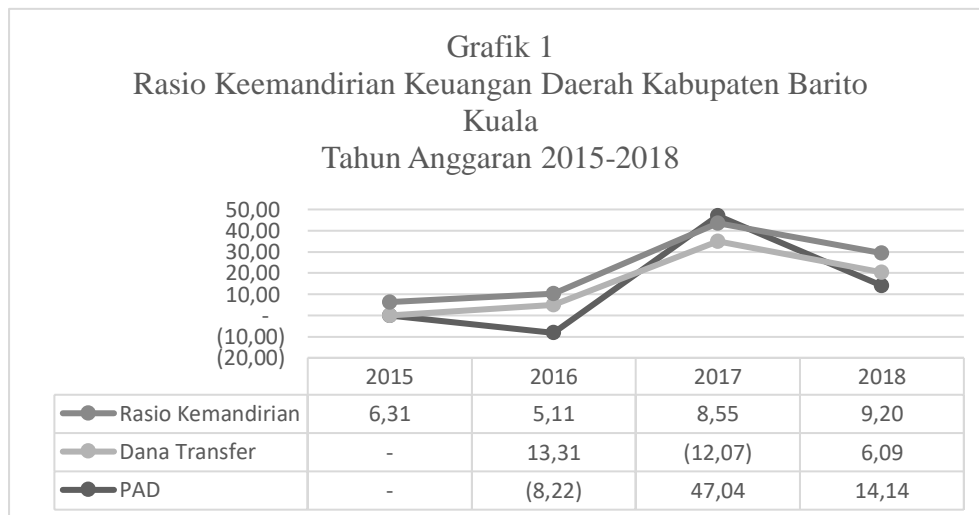
b. Indeks Kemampuan Rutin

Dalam mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja rutinnya pemerintah dapat menggunakan alat ukur yaitu IKR.

HASIL DAN ANALISIS

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

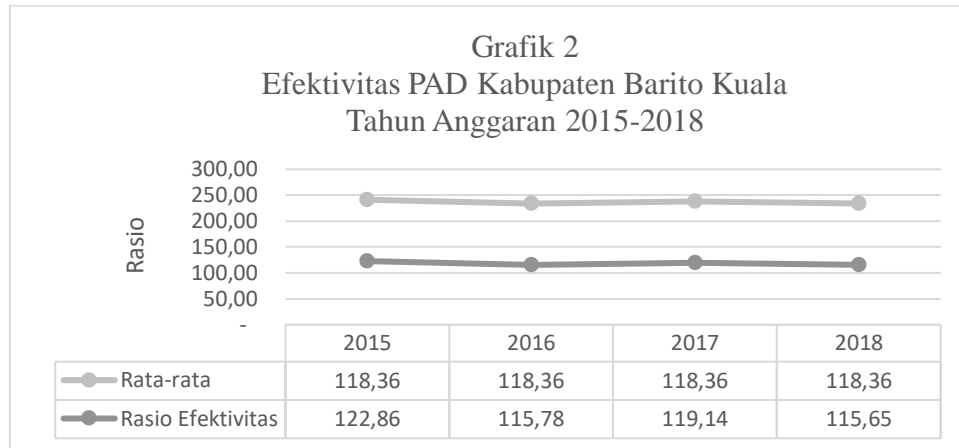


Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala berada pada kriteria instruktif. Dimana jika dirata-rata Rasio Kemandirian masih berada pada interval 0,00-0,25 yaitu sebesar 7,29%. Artinya pemerintah pusat memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur segala aktivitas Pemerintah Daerah

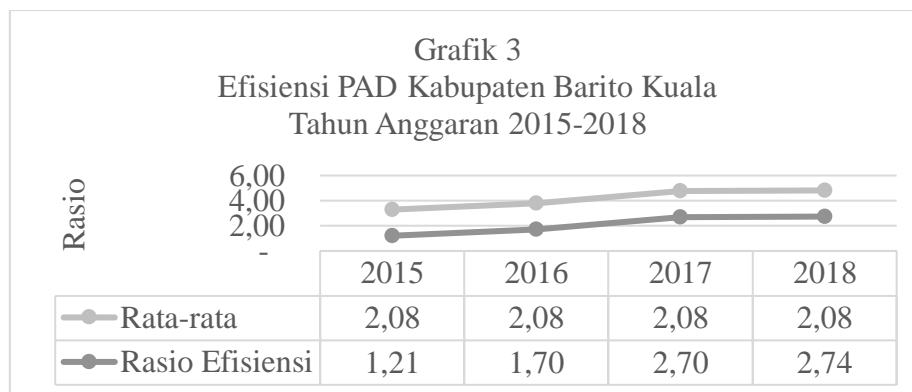
Kabupaten Barito Kuala dibandingkan pemerintah daerahnya sendiri, karena pemerintah daerah masih sangat bergantung terhadap biaya transfer dari pemerintah pusat.

2. Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD



Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)

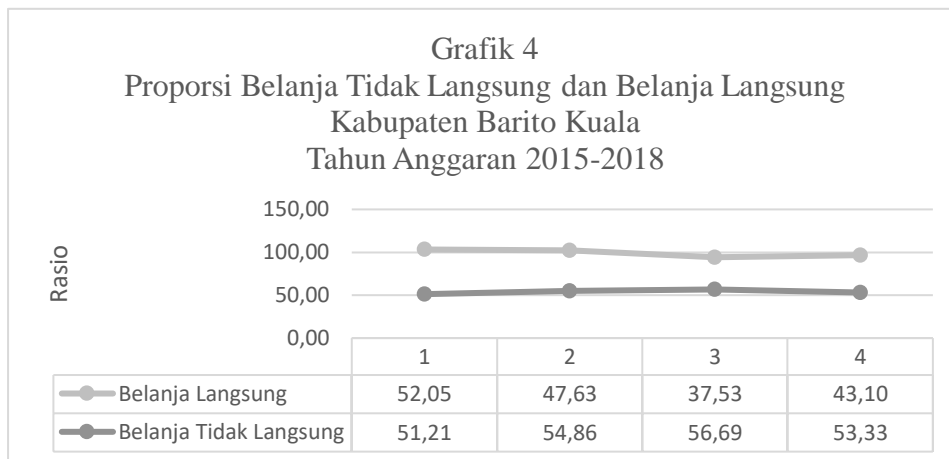
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama 4 (empat) tahun berturut-turut telah mencapai tingkat efektivitas. Begitupun dengan hasil rata-rata hitung sebesar 118,36%. Begitupun dengan hasil perhitungan tingkat efisien Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tingkat yang efisien dengan rata-rata hitung selama 4 empat) tahun sebesar 2,09%. Berikut disajikan dalam bentuk grafik.



Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)

Artinya selama 4 (empat) tahun terakhir ini pemerintah telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan terus berupaya menggali sumber potensi daerah sehingga dapat menambah PAD.

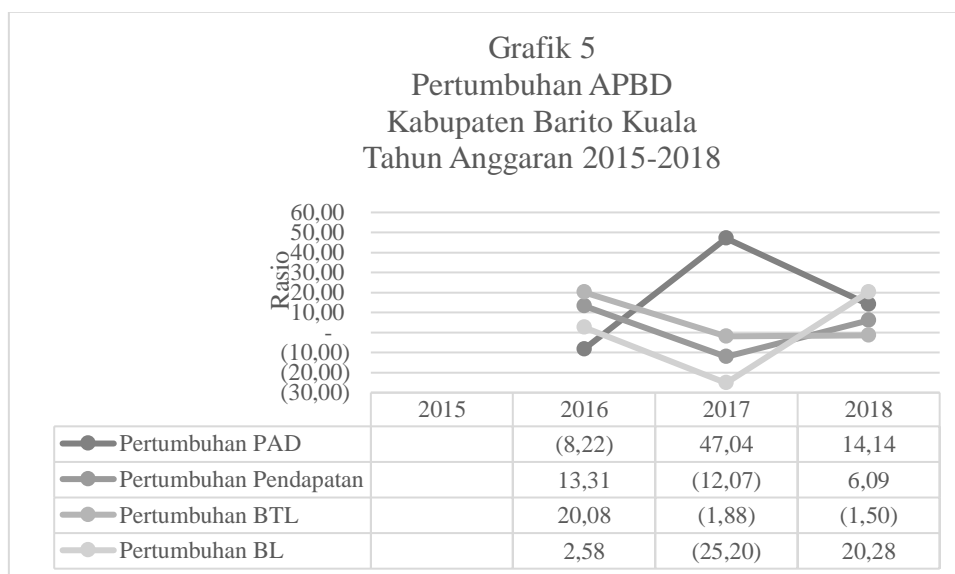
3. Analisis Rasio Aktivitas



Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata selama 4 (empat) tahun anggaran, pemerintah masih memprioritaskan Belanja Tidak Langsung, terbukti dengan perkembangan rasio Belanja Langsung yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini semakin kuat dibuktikan dengan melihat hasil perhitungan rata-rata rasio selama 4 (empat) tahun, rasio pada Belanja Tidak Langsung sebesar 54,02% lebih besar dari rasio Belanja Langsung sebesar 45,08%. Namun meskipun begitu bukan berarti pemerintah tidak membelanjakan dana secara efisien, namun dana Belanja Tidak Langsung tersebut direalisasikan terhadap Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil.

4. Analisis Rasio Pertumbuhan APBD



Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD sempat mengalami peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya realisasi pajak yang diperoleh. Secara rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 13,24%. Sedangkan untuk pertumbuhan pendapatan secara rata-rata dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 1,83%. Pertumbuhan besar dipengaruhi oleh pos PAD (Pendapatan pajak dan Lain-lain PAD yang Sah) serta kontribusi Dana Transfer (Dana Bagi Hasil SDA, DAU dan DAK). Selanjutnya pada pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung berturut-turut secara rata-rata sebesar 4,18% dan 0,59%. Terlihat jelas bahwa pemerintah lebih memprioritaskan Belanja Tidak Langsung. Seharusnya pemerintah yang memiliki pendapatan rendah lebih memprioritaskan pada pos Belanja Langsung. Besarnya alokasi untuk Belanja Tidak Langsung menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala lebih memprioritaskan belanja untuk pengeluaran rutin guna mendukung aktivitas pemerintahan dan belum optimal memperhatikan pembangunan daerah sebagai daerah otonom yang seharusnya lebih mengutamakan alokasi untuk penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana yang akan menambah aset daerah dalam memenuhi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan berfluktuasi meskipun secara rata-rata cenderung positif namun terkategori sangat memprihatinkan, masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya pembangunan otonomi daerah Kabupaten Barito Kuala.

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

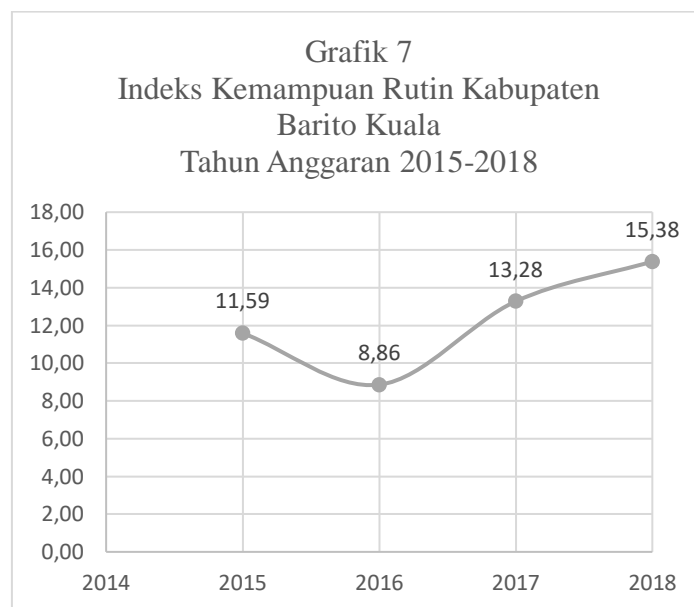
1. Rasio Derajat Otonomi Fiskal

Berdasarkan grafik di bawah terlihat bahwa dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, kontribusi PAD relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerah terbilang sangat kurang. Dilihat dari skala interval, Rasio Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala secara rata-rata berada pada kisaran 6,63%. Meskipun pada pos Pendapatan Pajak Daerah mengalami pencapaian target yang luar biasa yaitu sebesar 153,73% namun hal ini belum cukup untuk mendongkrak PAD secara keseluruhan. Berikut disajikan dalam bentuk grafik.



Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)

2. Indeks Kemampuan Rutin



Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa tingkat PAD cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Total Belanja Tidak Langsung sehingga Indeks Kemampuan Rutin berada pada skala kurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan PAD terbilang kurang dalam membiayai Belanja Tidak Langsung dan selama ini lebih banyak bergantung pada biaya transfer Pemerintah Pusat.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian menemukan hasil Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio Kemandirian Daerah bersifat instruktif, Rasio Aktivitas belum seimbang, dimana Belanja Tidak Langsung lebih diprioritaskan dibandingkan dengan Belanja Langsung oleh pemerintah. Rasio Efektivitas dan Efisiensi terbilang cukup baik sedangkan Rasio Pertumbuhan bersifat fluktuatif. Sedangkan Kemampuan Keuangan Daerah berupa Derajat Otonomi Fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin dinilai masih kurang.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti memperoleh informasi data non keuangan dari narasumber dikarenakan keterbatasan pengetahuan. Dalam penelitian ini tidak didapatkan hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh karena penulis tidak menganalisis keseluruhan unsur perkembangan APBD. Keterbatasan data keuangan, peneliti hanya meneliti dengan jumlah tahun selama 4 (empat) tahun terakhir dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh dari instansi, sehingga sulit untuk untuk membandingkan perbandingan dari tahun ke tahun. Perbedaan dari rekening LRA tahun 2015 dengan 2018 menyebabkan komponen rasio menjadi sulit untuk diidentifikasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja dan kemampuan keuangan Kabupaten Barito Kuala masih belum optimal. Hal ini terjadi karena Anggaran maupun Realisasi Anggaran PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Barito Kuala sangat rendah. Rasio kemandirian berada pada kriteria instruktif. Namun tingkat efektivitas dan efisien berada pada kategori baik. Sedangkan Rasio Aktivitas masih tidak seimbang antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pada Rasio Pertumbuhan berfluktuatif, perlu perbaikan perencanaan keuangan dan peningkatan PAD yang lebih tersusun dengan baik. Sedangkan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala belum mencapai ideal.

Saran

Berdasarkan perhitungan Rasio Aktivitas Belanja secara normatif, tidak terjadi keseimbangan antar belanja. Dengan ini pemerintah diharapkan mampu mendongkrak

Belanja Langsung guna peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bersama dengan masyarakat diharapkan mampu menggali dan meningkatkan pengelolaan potensi daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Dalam upaya mencapai tingkat kemampuan keuangan yang ideal, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala harus berupaya untuk mengurangi ketergantungan bantuan dana Pemerintah Pusat.

Bibliography

- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bisma, I. D., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun Anggaran 2003–2007. *GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3*, 85.
- Efendi, D., & Wuryanti, S. (2011). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Nganjuk. *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan* , 1.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaho, J. R. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kusufi, A. H. (2014). *Teori, konsep dan aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintahan Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

- Rudiyanto, Muhamad. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Daerah Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Solihin, I. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Suwanda, D. (2017). *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD Dalam Penyusunan PERDA APBD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tamboto, L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara . *Jurnal EMBA 755 Vol.2 No.2* , 765.
- Tarjunajah, A. W. (2018). Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jabodetabek. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5 No. 2*, 185-186.
- Widjaja, P. D. (2004). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yasrie, A. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan Volume 1 No. 2*, 80.